**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dalam rangka penetapan dan pelaksanaan upah/gaji minimum, tiap Negara mempunyai kelembagaan yang berbeda. Sama halnya di Indonesia, ketentuan upah/gaji gaji minimum telah dimulai sejak Tahun 1956. Berdasarkan keputusan presiden No.58 Tahun 1969, dibentuk Dewan Penelitian Pengupahan Nasional (DPPN) dengan anggota mewakili unsur pemerintah, bank sentral, bappenas, universitas, serikat pekerja, dan organisasi pengusaha.

Begitu pula dengan laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang berada diperingkat paling tinggi di Indonesia dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Makassar diatas 9%. Bahkan pada Tahun 2008 lalu pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai angka 10,83%, pesatnya pertumbuhan ekonomi saat itu bersamaan dengan gencarnya pembangunan infrastuktur yang mampu mendorong perputaran ekonomi.

Tenaga kerja merupakan pilar utama dan memiliki kontribusi besar terhadap jalannya aktivitas roda perekonomian, Pasal 98 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yakni pemerintah membentuk Dewan Pengupahan Nasional (DPN), Dewan Pengupahan Provinsi(DPP), dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (DPK) dengan anggota mewakili unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, perguruan tinggi, dan pakar. DPP dan DPK pada dasarnya mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

1. Melakukan penelitian harga dan menghitung kebutuhan fisik minimum (KFM) atau sekarang ini kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja;
2. Secara periodik atau setiap tahun melakukan penelitian kemampuan perusahaan untuk menghitung dan mengusulkan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota;
3. Memberikan bahan-bahan dan saran kepada gubernur dan bupati/walikota untuk penyusunan kebijakan pengupahan dan ketetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Hal di atas menjelaskan mengenai bagaimana pengaturan upah/gaji minimum pada setiap provinsi, dan kabupaten/kota diatur oleh dewan masing-masing. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pada tingkat provinsi diwakili oleh DPP dan untuk tingkat kabupaten/kota diwakili oleh DPK.

Pemadam Kebakaran adalah petugas yang dilatih dan bertugas untuk menganggulangi kebakaran, petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran, petugas juga dilatih untuk menyelamatkan korban kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, dan lain-lain. Dinas Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaranyang termasuk dalam Dinas Gawat Darurat. Biasanya pegawai pemadam kebakaran memakai baju anti api agar tidak mudah terbakar dan juga mereka memakai bagian baju yang menkilat agar mudah terlihat.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dapat diberi gaji serta tunjangan yang sesuai dengan pekerjaan mereka yang sangat beresiko agar hal tersebut mampu meningkatkan motivasi kerja para pegawai. Dibawah ini terdapat tabel yang memperlihatkan data kebakaran yang terjadi di Kota Makassar dalam lima Tahun terakhir:

Tabel 1. Data Tahunan Bencana Kebakaran Kota Makassar Dalam Lima Tahun Terakhir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Kebakaran | Luas Areal (M2) | Kerugian  (Ditaksir dalam Rp) |
| 1 | 2011 | 160 | 11,738 | Rp 15.861.500.000 |
| 2 | 2012 | 148 | 68,544 | Rp 78.363.190.000 |
| 3 | 2013 | 150 | 70,134 | Rp 41.495.326.000 |
| 4 | 2014 | 150 | 34,871 | Rp 1.330.719.401.000 |
| 5 | ***Januari*** 2015 | 10 | 249 | Rp 1.271.350.000 |

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, 2015

Tabel.1 di atas menjelaskan bahwa jumlah kebakaran yang terjadi pada tahun 2011 mencapai 160 kejadian dan mengalami kerugian sebesar Rp 15.861.500.000, tetapi dengan adanya sosialisasi secara terus menerus oleh Dinas Pemadam Kebakaran tentang bahaya kebakaran dapat kita lihat pada tabel di atas bahwa jumlah kebakaran yang terjadi tiap tahun menurun. Tetapi pada tahun 2014 jumlah kerugian yang ditaksir dalam rupiah mengalami peningkatan sebesar Rp 1.330.719.401.000. Hal tersebut mendorong dinas terkait untuk melakukan penyuluhan secara berkala, adapun tabel dibawah ini dapat memperlihatkan beberapa kecamatan yang telah diberikan penyuluhan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar dalam Tiga (3) tahun terakhir:

Tabel 2. Data Penyuluhan Bahaya Kebakaran.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun  2013 | Tahun  2014 | Tahun  2015 |
| 1 | Kec. BiringKanaya | Penyuluhan dilakukan melalui media elektronik yaitu Radio Dan Televisi | Kec. Mamajang |
| 2 | Kec. Tamalanrea | Kec. Mariso |
| 3 | Kec. Wajo | Kec. Tallo |
| 4 | Kec. Pannakukang | Kec. Tamalate |
| 5 | Kec. Rappocini | Kec. Makassar |
| 6 | Kec. Ujung Pandang | Kec. Bontoala |
| 7 | Kec. Manggala | Kec. Ujung Tanah |

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, 2015

Tabel 2. Menjelaskan bahwa pada tahun 2013 penyuluhan bahaya kebakaran dilaksanakan dibeberapa kecamatan yakni Biringkanaya, Tamalanrea, Wajo, Panakukang, Rappocini, Ujung Pandang, dan Manggala. Sedangkan di tahun 2014 teknik penyuluhan dialihkan ke media elektronik yaitu televisi dan radio yang dimuat oleh stasiun televise CelebesTv dan Fajar Tv baru di tahun 2015 penyuluhan kebeberapa kecamatan dilakukan kembali yakni pada kecamatan Mamajang, Mariso, Tallo, Tamalate, Makassar, Bontoala, dan Ujung Tanah.

Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Motivasi sangat berpengaruh terhadap hasil yang dikerjakan oleh pegawai, maka pemberian motivasi kerja kepada pegawai Dinas Pemadam Kebakaran sangat dibutuhkan mengingat jenis pekerjaan yang mereka miliki sangat beresiko. Pemberian motivasi yang baik dan tepat kepada pegawai mampu memberikan semangat tersendiri, karena dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tidak dipungkiri adanya kejenuhan yang dirasakan oleh pegawai pada dinas terkait.

Hal mengenai pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran di atas juga diatur oleh Perda No. 27 Tahun 2005 tentang pembentukan dan susunan organisasi tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan bencana serta Sk. Walikota Makassar No. 73 Tahun 2005 tentang uraian dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Adapun tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulang Bencana yakni membina dan mengendalikan kebijakan dibidang Pemadam Kebakaran yang meliputi: pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, sarana dan prasaran, serta penyuluhan dan pengawasan.

Sangat beresikonya pekerjaan yang harus diemban oleh petugas pemadam kebakaran membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai pemberian gaji dan tunjangan mampu motivasi petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugasnya menyelamatkan masyarakat yang terkena musibah. Demikian juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar yang terletak di Jl. Dr. Sam Ratulangi Komp. PDAM No. 11 Makassar. Karena banyaknya dan meningkatnya jumlah kejadian kebakaran di Kota Makassar membuat petugas pemadam kebakaran Kota Makassar harus bekerja ekstra keras menyelesaikan tugasnya menyelamatkan masyarakat tidak hanya pada saat kebakaran saja tetapi juga pada saat terjadi kecelakaan ataupun musibah. Dinas yang memiliki semboyan “Pantang Pulang Sebelum Padam” ini patut diberi apresiasi yang cukup besar karena mereka tidak mengenal hujan, badai, banjir, siang, ataupun malam mereka dengan ikhlas meninggalkan keluarga demi menyelamatkan orang lain, mereka mampu bertahan dan memenuhi tanggung jawab mereka sebagai penyelamat.

Dari uraian fenomena tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Gaji dan Tunjangan Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar”.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan pemberian gaji dan tunjangan secara parsial terhadap motivasi kerja pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar?
2. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan pemberian gaji dan tunjangan secara simultan terhadap motivasi kerja pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian gaji dan tunjangan secara parsial terhadap motivasi kerja pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian gaji dan tunjangan secara simultan terhadap motivasi kerja pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar.
3. **Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang pernah didapat dan mengaplikasikan secara empiris di dunia nyata dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara lebih mendalam khususnya tentang program keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi perusahaan dalam usaha meningkatkan motivasi kerja pegawai pada Dinas terkait.
3. Sebagai bahan perbandingan dan bahan penelitian berikutnya.